



Ronald Tehupuring<sup>1)</sup> Rafli Alvaro Lingga<sup>2)</sup>

Universitas Gadjah Mada  
Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281  
ronaldtehpuring@gmail.com  
rafililingga1@gmail.com



## **INTERNAL CONTROL SYSTEM AS PREDICTOR OF ACCOUNTING FRAUD IN LOCAL GOVERNMENT. COULD INDIVIDUAL LOYALTY MITIGATE IT?**

## **SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI PREDIKTOR KECURANGAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAH DAERAH. DAPATKAH LOYALITAS INDIVIDU MEMITIGASINYA?**

### **ABSTRACT / ABSTRAK**

*Various cases of corruption occurring in the government sector and the gaining of unqualified audit opinion of local government financial reports that is not yet optimal in some regions in Indonesia indicate that internal control system is weak and the lack of individual loyalty in achieving organizational goals. Those lead to the practice of accounting fraud. This study aims to examine the effect of internal control system on accounting fraud with individual loyalty as a moderating variable. This study uses accounting students of Gadjah Mada University as respondents through purposive sampling technique by spreading the research module through scenario as an introduction for respondents in answering research questions. The analytic tool uses SmartPLS version 3.0. The results show that when the internal control of local government organizations is higher, the practice of accounting fraud will be lower. Conversely, when the internal control system is low, the accounting fraud will be higher. Furthermore, the interaction between internal control system and loyalty does not affect individuals in committing accounting fraud in local governments.*

Berbagai kasus korupsi yang terjadi pada sektor pemerintah serta belum optimalnya perolehan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah pada beberapa daerah di Indonesia menunjukkan masih lemahnya sistem pengendalian intern serta kurangnya loyalitas individu dalam mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut memicu terjadinya praktik kecurangan akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kecurangan akuntansi dengan loyalitas individu sebagai variabel moderasi. Responden penelitian adalah mahasiswa sarjana akuntansi Universitas Gadjah Mada. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan menyebarkan modul penelitian melalui skenario sebagai pengantar bagi responden dalam menjawab pertanyaan penelitian. Alat analisis menggunakan SmartPLS versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika pengendalian intern organisasi pemerintah daerah semakin tinggi, praktik kecurangan akuntansi akan semakin rendah. Sebaliknya ketika sistem pengendalian intern rendah, kecurangan akuntansi akan semakin tinggi. Sedangkan interaksi antara pengendalian intern dan loyalitas tidak mempengaruhi individu melakukan kecurangan akuntansi di pemerintah daerah.

#### **KEYWORDS:**

*Loyalty; Internal Control System; Accounting Fraud*

#### **KATA KUNCI:**

Loyalitas; Sistem Pengendalian Intern; Kecurangan Akuntansi

#### **SEJARAH ARTIKEL:**

**Diterima pertama:** 3 Oktober 2017

**Dinyatakan dapat dimuat:** 19 Desember 2017

## PENDAHULUAN

Berbagai kasus korupsi yang terjadi pada sektor pemerintahan di Indonesia menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern belum diterapkan secara efektif. Data Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa selama semester I tahun 2017, Aparat Penegak Hukum (APH) berhasil menaikan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan sebanyak 266 kasus korupsi. Kasus-kasus tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,83 triliun dan nilai suap mencapai Rp118,1 miliar dengan jumlah tersangka sebanyak 587 tersangka kasus korupsi (ICW, 2017).

Tabel 1 menunjukkan bahwa kasus pungutan liar merupakan kasus yang menjadi modus utama pelaku korupsi pada semester I tahun 2017. Kasus ini semakin meningkat ketika adanya Tim Saber Pungli yang melakukan tindakan aktif terhadap *petty corruption*. Modus kasus korupsi berikutnya adalah penyalahgunaan anggaran dan proyek fiktif. Ketiga kasus ini menjadi sorotan pelaku korupsi karena adanya peluang dan keuntungan pribadi yang lebih besar dibandingkan kasus lainnya. Sebaliknya, kasus pencucian uang,

pemerasan dan penyunatan merupakan modus pelaku korupsi yang kurang menjadi perhatian utama pelaku korupsi.

ICW (2017) mengategorikan kasus-kasus tersebut berdasarkan lima wilayah teratas, lima lembaga teratas dan lima sektor teratas. Berdasarkan lima wilayah teratas, Jawa Timur merupakan wilayah dengan kasus korupsi tinggi yang menyebabkan kerugian negara diikuti dengan Riau, Pusat, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Selanjutnya pada sektor lembaga, pemerintah kabupaten dikategorikan sebagai lembaga dengan tingkat korupsi tinggi diikuti dengan pemerintah desa, pemerintah kota, kementerian dan pemerintah provinsi. Jika dilihat berdasarkan sektor, maka kasus korupsi yang paling banyak terjadi berada pada sektor pengelolaan anggaran desa, diikuti dengan keuangan daerah, pendidikan, transportasi, dan pertahanan.

Kasus korupsi menjadi perhatian penting media massa dan merupakan isu utama karena memengaruhi perekonomian dan stabilitas negara. Kasus korupsi merupakan salah satu bentuk kecurangan yang menimbulkan kerugian negara dan memberikan keuntungan bagi pelaku korupsi. Selain itu, berdasarkan

**Tabel 1.** Kasus Korupsi Semester I 2017 Berdasarkan Modus

Keterangan	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp. Miliar)	Nilai Suap (Rp.Miliar)
Mark Up	27	Rp. 288,7 Miliar	-
Penggelapan	29	Rp. 166,8 Miliar	-
Laporan Fiktif	24	Rp. 67,3 Miliar	-
Penyalahgunaan Anggaran	43	Rp. 763,3 Miliar	-
Suap	19	-	Rp. 118,1 Miliar
Penyunatan/Pemotongan	6	Rp. 331,2 Miliar	-
Pemerasan	2	-	-
Penyalahgunaan Wewenang	25	Rp. 155,2 Miliar	-
Kegiatan/Proyek Fiktif	35	Rp. 62,3 Miliar	-
Pungutan Liar	55	-	-
Pencucian Uang	1	-	-
<b>Total</b>	<b>266</b>	<b>Rp.1,83 Triliun</b>	<b>Rp.118,1 Miliar</b>

Sumber: ICW (2017)

keseluruhan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015, menunjukkan bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 313 (58%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 194 (36%) LKPD, opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 31 (5%) LKPD, dan opini Tidak Wajar (TW) atas 4 (1%) LKPD (BPK, 2016). Sebaliknya, jika dibandingkan dengan tahun 2014, maka kualitas LKPD meningkat secara signifikan yaitu, opini WTP sebesar 11% (47% ke 58%). Selain itu, kenaikan opini dari TW atau TMP menjadi WDP sebanyak 17 LKPD. Akan tetapi, terdapat LKPD yang mengalami penurunan opini sebanyak 34 dari 542 LKPD atau sebesar 6%. Hal ini menunjukkan belum optimalnya perolehan opini audit WTP oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena pengungkapan laporan keuangan beserta catatannya belum sepenuhnya memberikan informasi yang memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Konsisten dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004, *International Standard on Auditing* (ISA) 700 dan 705 dalam IFAC (2010a, 2010b), serta Buletin Teknis Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Bultek SPKN) Nomor 01 (BPK, 2012) menjelaskan bahwa kecukupan pengungkapan merupakan salah satu kriteria yang dijadikan dasar oleh auditor dalam merumuskan opini audit atas laporan keuangan pemerintah.

Berbagai kecurangan atau kasus korupsi yang terjadi umumnya dilakukan karena adanya peluang atau kesempatan. Peluang ini dimanfaatkan oleh pelaku korupsi karena lemahnya sistem pengendalian intern dan kurangnya loyalitas terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh individu. Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak dibatasi hanya pada bagian akuntansi dan keuangan, tetapi meliputi pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan sebagainya.

Apabila sistem pengendalian intern suatu organisasi lemah, individu cenderung melihat hal ini sebagai peluang dalam melakukan praktik kecurangan akuntansi. Sebaliknya, apabila sistem pengendalian intern suatu organisasi kuat, kecenderungan untuk melakukan praktik kecurangan akuntansi akan semakin kecil. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern merupakan salah satu faktor yang memengaruhi atau menjadi prediktor kecurangan akuntansi. Sedangkan loyalitas merupakan perilaku yang diikat pada suatu kesepakatan implisit yang secara sukarela dibuat oleh seseorang yang beroperasi dalam suatu komunitas yang saling bergantung satu sama lain untuk taat pada prinsip-prinsip moral yang universal dalam mencapai tujuan-tujuan individu dan kolektif (Coughlan, 2005). Apabila individu dalam suatu organisasi memiliki loyalitas tinggi, kecenderungan praktik kecurangan akuntansi akan semakin kecil. Sebaliknya, apabila individu dengan loyalitas rendah, kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi akan semakin tinggi.

Penelitian-penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah masih tergolong rendah, sehingga memengaruhi perumusan opini audit (Suhardjanto & Yulianingsih, 2011; Hilmi & Martani, 2012; Martani & Liestiani, 2012; Setyaningrum & Syafitri, 2012; Lesmana, 2014, Arifin, 2014 dan Khasanah & Rahardjo, 2014). Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dalam sejumlah laporan hasil pemeriksaan BPK dengan opini audit WTP, belum sepenuhnya sesuai dengan SAP. Penyebabnya adalah belum efektifnya sistem pengendalian intern di sektor publik, sehingga tujuan organisasi belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kecurangan

akuntansi pada pemerintah daerah dengan loyalitas individu sebagai variabel pemoderasi. Penelitian melibatkan mahasiswa sarjana akuntansi Universitas Gadjah Mada semester lima sebagai responden. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pemilihan variabel independen. Puspasari (2012) menguji pengaruh moralitas dan pengendalian intern terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan menggunakan 57 mahasiswa pascasarjana Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada sebagai partisipan. Selain itu, Ridwan (2013) menguji pengaruh loyalitas dan retaliasi terhadap kecenderungan akuntan untuk melakukan *whistleblowing* dengan menggunakan 70 mahasiswa pascasarjana Magister Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dan Jember sebagai partisipan.

## LANDASAN TEORI

### Kecurangan Akuntansi

Cressey (1953) dalam teorinya yaitu *Fraud Triangle Theory* menjelaskan bahwa “*Trusted persons become trust violators when they conceive of themselves as having a financial problem which is non-shareable, are aware this problem can be secretly resolved by violation of the position of financial trust, and are able to apply to their own conduct in that situation verbalizations which enable them to adjust their conceptions of themselves as trusted persons with their conceptions of themselves as users of the entrusted funds or property*”. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab utama individu melakukan kecurangan didasarkan pada tiga unsur utama yaitu, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Ruankaew (2013) menjelaskan bahwa kecurangan tidak dapat terjadi jika tidak ada ketiga unsur tersebut.

Tekanan melibatkan situasi individu yang menciptakan manfaat lebih seperti memper-

oleh keuntungan berupa penyuaipan dan dapat muncul dari masalah pekerjaan serta target kinerja yang tidak realistis. Contohnya adalah hutang yang menumpuk, gaya hidup mewah, dan lain-lain. Umumnya yang memotivasi individu melakukan kecurangan adalah masalah ekonomi. Akan tetapi, faktor keserakahan juga menjadi pertimbangan individu melakukan kecurangan. Kesempatan melakukan kecurangan dimungkinkan bila individu memiliki akses untuk aset dan informasi yang memicu individu melakukan kecurangan. Selanjutnya, rasionalisasi melibatkan individu untuk menyelaraskan tingkah lakunya dengan gagasan yang umum diterima melalui kesopanan dan kepercayaan. Oleh karena itu, umumnya individu yang tidak jujur cenderung lebih mudah merasionalisasi praktik kecurangan. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan karena individu berusaha untuk mencari pembenaran atas tindakannya.

Ikatan Akuntan Indonesia (2001) mendefinisikan kecurangan akuntansi sebagai (1) salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan; (2) salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) di Indonesia. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan akuntansi yaitu, (1) kecurangan laporan keuangan; (2) penyalahgunaan aset; dan (3) korupsi. Selain itu, Albercht (2004) menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap etika, kejujuran dan tanggung jawab merupakan faktor penting individu melakukan kecurangan akuntansi.

## Pengendalian Intern

*The Committe Of Sponsoring Organization Of Treadway Commission (COSO, 2013)* mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

*“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance”.*

Mengacu pada definisi di atas, pengendalian intern merupakan suatu proses bagian integral aktivitas operasional organisasi yang bertujuan untuk menyediakan keyakinan memadai atas efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, serta ketaatan organisasi terhadap hukum. Pengendalian intern menciptakan dasar deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan oleh individu sesuai dengan fungsinya karena diharapkan dapat menjamin perlindungan dana organisasi, memastikan bahwa ada pengelolaan aset yang efektif dan efisien, serta laporan keuangannya telah akurat. Akan tetapi, Campbell dan Hartcher (2010) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern tidak dapat menghilangkan semua kesalahan dan penyimpangan. Oleh karena itu, sistem pengendalian dapat dijadikan sebagai dasar manajemen memitigasi potensi risiko, sehingga risiko tersebut dapat dimitigasi sebelum terjadi risiko yang lebih besar.

Gamage dkk. (2014) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dirancang dan dipengaruhi oleh tata kelola organisasi, manajemen, dan pihak lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian kinerja dari tujuan organisasi yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern dirancang dan diimplementasikan pada risiko bisnis yang akan mengancam pencapaian tujuan

organisasi. Abiola (2013) menyatakan bahwa pentingnya pengendalian intern dalam menilai risiko organisasi yang dapat mengancam tercapainya tujuan organisasi. Lemahnya sistem pengendalian intern akan menyebabkan skandal, kerugian, dan kegagalan organisasi. Sistem pengendalian intern dianggap efektif ketika individu atau kelompok organisasi mampu mengurangi risiko kehilangan aset, mencegah dan mendeteksi kesalahan, memastikan keandalan laporan keuangan dan kepatuhan undang-undang (Manas’seh, 1993).

Menurut Rajikumar (2009), sistem pengendalian intern yang efektif mensyaratkan bahwa semua risiko material, internal dan eksternal, terkendali dan tidak terkendali dapat memengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Manajemen organisasi harus menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis dan mengelola berbagai macam risiko yang dihadapi organisasi di semua tingkatan dan di semua departemen, sehingga manajemen organisasi perlu terus mengevaluasi profil risikonya. Palfi (2009), menjelaskan bahwa penilaian risiko adalah identifikasi dan evaluasi organisasi tentang bagaimana risiko dapat memengaruhi pencapaian tujuannya, sehingga menentukan pengendalian intern yang paling tepat yang diperlukan dalam mengelola risiko. Menurut Ofori (2011), karena risikonya adalah kejadian yang mengancam tercapainya tujuan organisasi, maka penilaian risiko adalah proses mendeteksi, menilai dan menentukan bagaimana risiko dapat diminimalisir untuk mencapai misi organisasi. Ada risiko internal dan eksternal yang dapat mencegah pencapaian tujuan di setiap tingkat dalam sebuah organisasi. Manajemen organisasi harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah risiko ini. Akan tetapi, terkadang manajemen tidak bisa terhindar dari risiko yang terjadi. Pada situasi ini, manajemen organisasi harus menentukan apakah akan menerima risiko, menguranginya sampai tingkat yang dapat diterima, atau menghindari risiko. Manajemen organisasi

harus memastikan setiap risiko dinilai dan ditangani dengan benar untuk mencapai tujuan organisasi (Millichamp, 2002).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wanjohi (2014) menunjukkan bahwa kecurangan berkembang pesat karena tersedianya kesempatan melakukan kecurangan termasuk lemahnya lingkungan pengendalian. Wainaina (2011) menjelaskan bahwa dalam evaluasi fungsi pengendalian intern selain pencegahan dan deteksi kecurangan, pengendalian intern harus mencerminkan kekuatan lingkungan akuntansi secara keseluruhan dalam suatu organisasi dan juga keakuratan catatan keuangan dan operasionalnya. Tunji (2013) dalam penelitiannya pada efektivitas sistem pengendalian intern menjelaskan bahwa runtuhnya sistem pengendalian intern dalam organisasi manapun akan menyebabkan kegagalan organisasi. Individu umumnya mengidentifikasi celah dalam prosedur pengendalian (pengendalian intern lemah) dan kemudian membandingkannya dengan imbalan dari perbuatan kecurangan melawan risiko atau hukuman jika mereka ditangkap (Khanna & Arora, 2009). Banyak individu yang memanfaatkan kelemahan pengendalian intern untuk melakukan kecurangan. Pengendalian intern yang lemah telah menyebabkan kerugian besar bagi beberapa organisasi (Hartman, 2014).

Corram, dkk. (2008) menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki fungsi audit internal akan lebih mudah dalam mendeteksi kecurangan akuntansi. Penelitian Hogan dkk. (2008) menunjukkan bahwa peranan auditor dapat mengurangi faktor kesempatan terkait kecurangan akuntansi. Menurut Bastian (2006), pengendalian akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Menurut Amrizal (2006), auditor

internal melakukan aktivitas audit sebagai berikut:

1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

### **Loyalitas**

Pada beberapa dekade ini, loyalitas didefinisikan sebagai karyawan yang tidak membahayakan para koleganya (Coughlan, 2005). Konsep ini menunjukkan bahwa adanya perilaku etis dan kepercayaan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, Coughlan (2005) menjelaskan bahwa loyalitas direfleksikan dalam perilaku yang dapat diikat melalui kesepakatan implisit, yang secara sukarela dibuat oleh seseorang yang beroperasi dalam suatu komunitas yang saling bergantung satu sama lain untuk patuh terhadap prinsip-prinsip moral yang umum dalam mencapai tujuan-tujuan individu dan kolektif.

Loyalitas memiliki peranan penting dalam

pencapaian tujuan organisasi karena mampu menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Loyalitas mengandung niat bahwa individu memiliki komitmen tinggi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan individu lain, kelompok, atau organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa seorang individu yang loyal akan memiliki komitmen yang tinggi dalam memajukan organisasi serta menghindari adanya berbagai skandal yang dapat menjatuhkan citra organisasi tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Semakin tinggi sistem pengendalian intern, maka semakin rendah kecurangan akuntansi pada pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin rendah sistem pengendalian intern, maka semakin tinggi kecurangan akuntansi pada pemerintah daerah.
- H2: Ketika sistem pengendalian intern tinggi dengan loyalitas individu tinggi, maka kecurangan akuntansi pada pemerintah daerah akan rendah. Sebaliknya, ketika sistem pengendalian intern rendah dengan loyalitas individu rendah, maka kecurangan akuntansi akan semakin tinggi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Universitas Gadjah Mada. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran modul penelitian. Sampel yang dipilih adalah mahasiswa sarjana akuntansi Universitas Gadjah Mada. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu mahasiswa akuntansi semester lima dan telah menyelesaikan mata kuliah akuntansi sektor publik dan pengauditan 1. Pertimbangan pemilihan sampel ini karena mahasiswa telah

dilengkapi dengan pemahaman komprehensif terkait akuntansi sektor publik dan *auditing* dan baru menyelesaikan kedua mata kuliah itu pada semester empat, sehingga dapat merepresentasikan berbagai fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan kedua mata kuliah itu. Selain itu, mahasiswa akan menjawab pertanyaan sesuai dengan skenario yang diberikan tanpa merasa adanya tekanan, sehingga mencerminkan hasil yang sesuai dengan konteks sebenarnya.

Penelitian menggunakan sistem pengendalian intern sebagai variabel independen, loyalitas sebagai variabel moderasi, dan kecurangan akuntansi sebagai variabel dependen. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran modul penelitian kepada responden dan menjelaskan secara singkat prosedur pengisiannya. Modul penelitian diadopsi dari penelitian sebelumnya. Responden diminta untuk membaca skenario penelitian dan selanjutnya menjawab pertanyaan. Pertanyaan dibuat dengan menggunakan skala Likert 7 poin yang akan mewakili jawaban responden berdasarkan skenario. Skala 1 dimulai dari sangat tidak setuju dan berakhir pada skala 7 yaitu sangat setuju.

Setelah peneliti menerima kembali modul penelitian, kemudian peneliti melakukan validasi untuk memastikan apakah pertanyaan telah dijawab oleh responden sesuai dengan skenario. Selanjutnya, peneliti meminta kesediaan delapan responden secara acak untuk wawancara singkat terkait jawabannya dalam modul penelitian. Alasan peneliti memilih kedelapan responden itu adalah untuk memperoleh hasil yang akurat karena peneliti membagi kedelapan responden dalam dua kategori yaitu empat responden dengan kategori terdapat sistem pengendalian intern dan empat responden lainnya dengan kategori tidak terdapat sistem pengendalian intern, sehingga diharapkan dapat mewakili jawaban responden terkait fenomena yang terjadi. Setelah itu, peneliti menguji kualitas data yang

terdiri dari validitas dan reliabilitas. Suatu butir pernyataan dikatakan valid, jika pernyataan itu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan butir pernyataan dikatakan reliabel, jika pernyataan itu stabil atau konsisten dari waktu ke waktu.

Uji validitas dilakukan melalui validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen dilakukan dengan mengevaluasi nilai *loading factor*. Sedangkan validitas diskriminan dilakukan melalui nilai *cross loading*. *Rule of thumb* untuk nilai *loading factor* harus lebih dari 0,5 dan nilai *cross loading* instrumen yang mengukur variabel harus lebih besar dari instrumen lainnya (Hair dkk., 2010). Setelah melalui uji kualitas data, maka peneliti selanjutnya menguji hipotesis dengan menggunakan SmartPLS versi 3.0. Pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi hasil perhitungan lebih kecil dari 0,05 atau t-statistik lebih besar dari 1,64, maka hipotesis terdukung, sebaliknya jika nilai signifikansi hasil perhitungan lebih besar dari 0,05, atau t-statistik kurang dari 1,64, maka hipotesis tidak terdukung. Definisi operasional variabel penelitian diringkas dalam tabel 2.

**Tabel 2.** Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Pengukuran Variabel	Skala
<b>Kecurangan Akuntansi</b> Kecurangan akuntansi adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang mengetahui bahwa kekeliruan itu dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau organisasi/pihak lain (ACFE, 2014).	Kecurangan akuntansi diukur dengan meminta responden membaca skenario dan mengisi pertanyaan sesuai dengan skenario melalui skala Likert 7 poin. Skenario diadopsi dari penelitian Puspasari (2012).	Interval
<b>Loyalitas</b> Loyalitas adalah perilaku yang diikat pada suatu kesepakatan implisit, yang secara sukarela dibuat oleh seorang yang beroperasi dalam suatu komunitas yang saling bergantung satu sama lain, untuk taat pada prinsip-prinsip moral yang universal dalam mencapai tujuan-tujuan individu yang kolektif (Coughlan, 2005).	Loyalitas diukur melalui 12 item pernyataan dengan skala Likert 7 poin. Kuesioner diadopsi dari penelitian Ridwan (2013).	Interval
<b>Pengendalian Intern</b> Pengendalian intern adalah suatu alat yang digunakan dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, serta sebagai alat koordinasi yang berfungsi untuk melindungi aset, keakuratan dan keberadaannya untuk menunjang efektivitas operasional organisasi	Pengendalian intern diukur melalui dua skema skenario yaitu skenario terdapat pengendalian intern dan tidak terdapat pengendalian intern. Skenario diadopsi dari penelitian Puspasari (2012).	Nominal

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil jawaban responden akan diuji melalui cek validasi atas jawaban responden untuk menentukan benar atau salah dengan dua pertanyaan dalam modul penelitian. Pertanyaan pertama mengenai tugas responden sebagai Kepala Dinas X dan pertanyaan kedua mengenai gambaran elemen pengendalian intern di Dinas X. Hasil cek validasi diringkas dalam tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa peneliti membagi modul penelitian kepada 68 responden selama dua hari berturut-turut, sehingga digolongkan dalam responden kelompok satu dan responden kelompok dua. Tingkat respon mahasiswa akuntansi semester lima terhadap penelitian sebesar 55,8% dan kuesioner yang berhasil diolah sebesar 51,4% karena terdapat tiga responden yang tidak lolos cek validasi pertanyaan.

Statistik deskriptif responden diringkas dalam tabel 4. Tabel 4 menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin wanita lebih dominan dibandingkan responden dengan



jenis kelamin pria. Selain itu, umur responden antara 18-20 tahun yang paling dominan dan duduk pada program akuntansi semester lima.

Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa butir pernyataan yang memiliki nilai

*loading factor* kurang dari 0,5. Oleh karena itu, butir-butir pernyataan tersebut akan dikeluarkan dari variabel dan dilakukan uji revisi pengukuran. Gambar 2 adalah hasil uji revisi diagram jalur iterasi algoritma.

**Tabel 3.** Hasil Cek Validasi

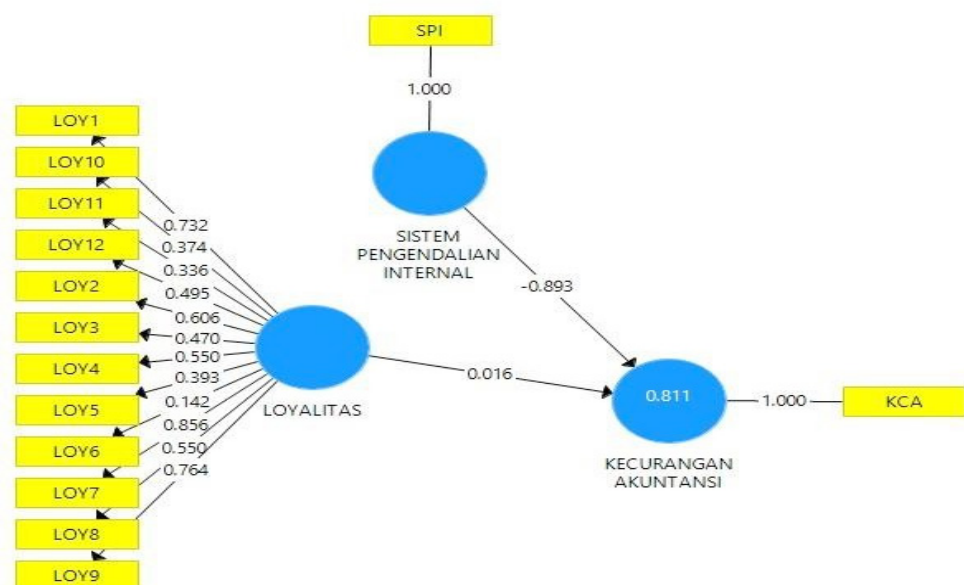
Kelompok Penelitian	Jumlah Responden	Modul Penelitian yang Kembali	Responden Gagal Menjawab Pertanyaan	Sampel Akhir
Kelompok 1	36	21	2	19
Kelompok 2	32	17	1	16
Total	68	38	3	35

Sumber: data primer diolah

**Tabel 4.** Profil Responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin :		
1. Pria	12	34.28%
2. Wanita	23	65.72%
Umur :		
1. < 18 tahun	0	0%
2. 18-20 tahun	31	88.57%
3. 21-23 tahun	4	11.43%
4. > 23 tahun	0	0%

Sumber: data primer diolah



**Gambar 1.** Diagram Analisis Jalur (Iterasi Algoritma PLS)

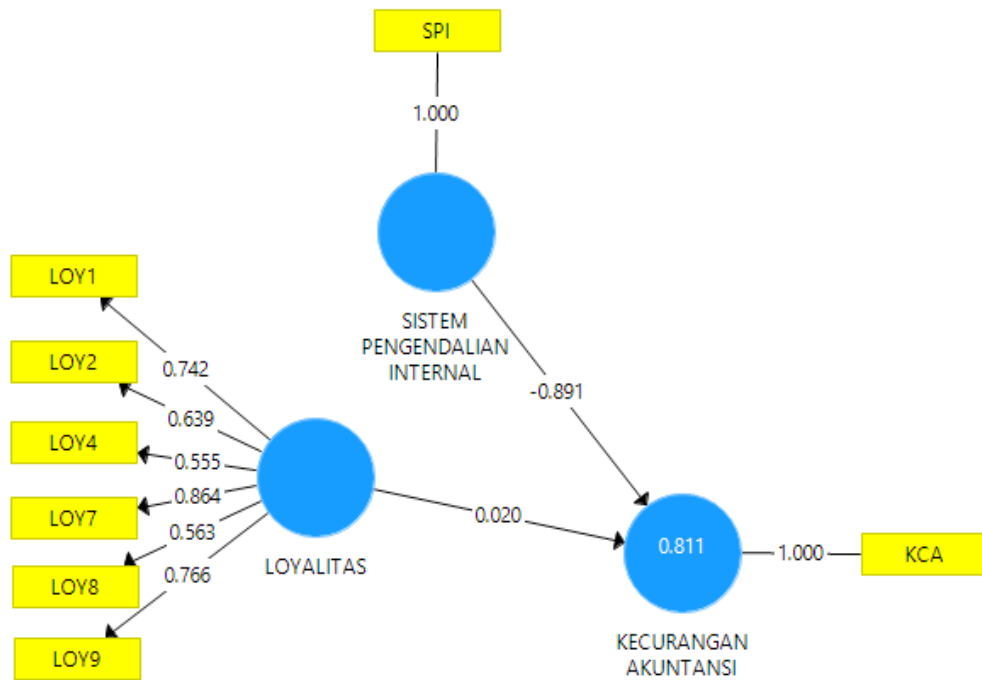
Sumber: hasil analisa data dengan PLS

Berdasarkan model revisi diagram analisis jalur melalui iterasi algoritma PLS, maka peneliti menyimpulkan bahwa butir-butir yang digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas. Hal ini dibuktikan melalui nilai *loading factor* lebih dari 0,5, nilai AVE lebih dari 0,5, nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6, dan nilai *Composite Reliability* lebih besar dari 0,6. Oleh karena itu, proses selanjutnya dapat dilakukan yaitu pengujian hipotesis penelitian.

Berdasarkan model revisi diagram analisis jalur melalui iterasi algoritma PLS, maka

peneliti menyimpulkan bahwa butir-butir yang digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas. Hal ini dibuktikan melalui nilai *loading factor* lebih dari 0,5, nilai AVE lebih dari 0,5, nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6, dan nilai *Composite Reliability* lebih besar dari 0,6. Oleh karena itu, proses selanjutnya dapat dilakukan yaitu pengujian hipotesis penelitian.

Hipotesis satu (H1) menyatakan bahwa semakin tinggi sistem pengendalian intern, semakin rendah kecurangan akuntansi pada pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin

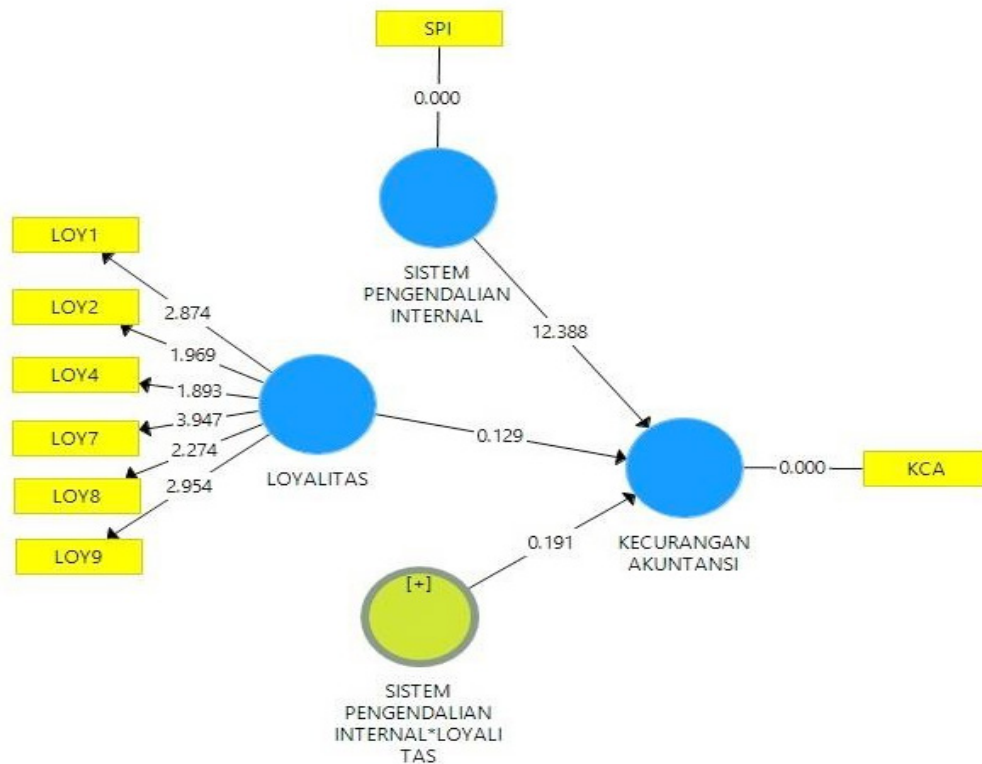


**Gambar 2.** Revisi Diagram Analisis Jalur (Iterasi Algoritma PLS)  
 Sumber: hasil analisa data dengan PLS

**Tabel 5.** Overview Iterasi Algoritma PLS

Variabel	AVE	Composite Reliability	Cronbach Alpha	R Square
Sistem Pengendalian Intern	1.000	1.000	1.000	0.000
Loyalitas Individu	0.587	0.847	0.804	0.000
Kecurangan Akuntansi	1.000	1.000	1.000	0.811

Sumber: data primer diolah



Gambar 3. Pengujian Hipotesis

Tabel 6. Koefisien Jalur

Hipotesis	Original Sampel	Sample Mean	Std. Deviation	T-Statistics	P-Value
SPI -> KCA	-0.892	-0.874	0.072	12.388	0.000
LOY -> KCA	0.012	0.030	0.096	0.129	0.897
SPI*LOY -> KCA	0.013	0.032	0.070	0.191	0.849

Sumber: data primer diolah

rendah sistem pengendalian intern, semakin tinggi kecurangan akuntansi pada pemerintah daerah. Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis satu terdukung. Sistem pengendalian intern pemerintah daerah memiliki peranan penting karena dirancang untuk mengontrol, mengawasi, dan mengarahkan organisasi pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya. Sistem ini digunakan oleh manajemen pemerintah daerah untuk mengendalikan aktivitas operasional dan membantu menyediakan informasi akuntansi yang relevan dan reliabel.

Berdasarkan hasil wawancara singkat

dengan delapan responden, maka peneliti menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern yang efektif dapat mendorong individu untuk tidak berperilaku oportunistik. Efektivitas pengendalian intern dapat diterapkan melalui mekanisme regulasi yang ketat untuk mengurangi berbagai risiko yang dapat terjadi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, lemahnya sistem pengendalian intern dapat memicu perilaku individu dalam melakukan kecurangan.

Sistem pengendalian intern yang efektif pada dasarnya digunakan untuk menjaga kekayaan pemerintah daerah dari kemungkinan

penyalahgunaan, mendorong efisiensi kebijakan manajemen pemerintah daerah, memastikan bahwa informasi akuntansi telah disajikan secara akurat, serta kepatuhan terhadap sistem dan prosedur atau regulasi yang berlaku. Sebaliknya, jika keempat elemen efektivitas pengendalian intern tidak dilakukan dengan baik, maka akan memberikan peluang kepada individu untuk melakukan kecurangan akuntansi. Hal ini menjadi penyebab munculnya berbagai skandal, kerugian, kegagalan dan reputasi organisasi pemerintah menjadi tidak baik. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Gamage dkk. (2014), Abiola (2013), dan Manas'seh (1993).

Rajikumar (2009) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang efektif mensyaratkan bahwa semua risiko material, internal dan eksternal, terkendali dan tidak terkendali dapat memengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, manajemen organisasi pemerintah daerah harus menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis dan mengelola berbagai macam risiko yang dihadapi organisasi di semua tingkatan dan di semua departemen, sehingga manajemen organisasi pemerintah daerah perlu terus mengevaluasi profil risikonya.

Hipotesis dua (H<sub>2</sub>) menyatakan bahwa ketika sistem pengendalian intern tinggi dengan loyalitas individu tinggi, kecurangan akuntansi pada pemerintah daerah akan rendah. Sebaliknya, ketika sistem pengendalian intern rendah dengan loyalitas individu rendah, kecurangan akuntansi pada pemerintah daerah akan tinggi. Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis dua tidak terdukung. Loyalitas individu merupakan suatu sarana yang mengikat individu yang berhubungan dengan kesetiaan, kepatuhan dan ketaatan terhadap organisasi pemerintah daerah. Loyalitas cenderung dipandang sebagai pengabdian, ketaatan, dan pengorbanan individu terhadap organisasi pemerintah daerah.

Hasil wawancara dengan delapan responden

terkait loyalitas adalah sebagai berikut: (1) loyalitas dipandang sebagai sikap dukungan atau kepatuhan individu terhadap visi dan misi organisasi, (2) banyaknya tenaga dan waktu yang diberikan individu kepada organisasi, (3) rasa memiliki individu terhadap organisasi, (4) individu memiliki kesukaan terhadap pekerjaannya, (5) relasi yang baik diantara individu dalam organisasi, (6) individu bertanggung jawab terhadap organisasinya, (7) individu memiliki komitmen untuk bekerja keras merealisasikan tujuan organisasi, (8) taat terhadap regulasi yang berlaku, dan (9) besarnya gaji atau bonus yang diterima individu. Selain itu, faktor yang memengaruhi berkurangnya loyalitas individu terhadap organisasi yaitu (1) hubungan antara individu satu dengan lainnya kurang harmonis, (2) fasilitas yang kurang mendukung, (3) individu merasa kurang dihargai atas pekerjaannya, (4) gaji, bonus atau jenjang karir yang tidak pasti, dan (5) budaya organisasi yang kurang cocok.

Loyalitas individu tidak dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kecurangan akuntansi pada pemerintah daerah. Artinya, ketika individu dengan loyalitas tinggi atau rendah dengan ada atau tidak adanya sistem pengendalian intern, maka tidak memengaruhi individu dalam melakukan kecurangan pada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas individu bukan menjadi bagian penting individu dalam melakukan kecurangan tetapi lebih pada faktor kesempatan, keserakahan, rasionalitas, maupun tekanan dari pihak lain. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Ruankaew (2013) menjelaskan bahwa kecurangan tidak dapat terjadi jika tidak adanya faktor kesempatan, tekanan, maupun rasionalitas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini merupakan pengembangan model penelitian yang didasari oleh fenomena kasus korupsi dan belum optimalnya perolehan

opini audit WTP oleh pemerintah daerah, sehingga hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teori, metodologi, dan kebijakan. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem pengendalian intern yang efektif akan mengurangi individu melakukan kecurangan akuntansi pada pemerintah daerah. Sebaliknya sistem pengendalian intern yang lemah dapat memicu individu melakukan kecurangan akuntansi pada pemerintah daerah. Selain itu, tinggi rendahnya loyalitas individu dengan ada atau tidaknya sistem pengendalian intern tidak dapat memengaruhi kecurangan akuntansi pada pemerintah daerah.

Hasil penelitian memberikan kontribusi teori bahwa sistem pengendalian intern yang efektif setidaknya harus memenuhi keempat unsur yaitu (1) menjaga kekayaan pemerintah daerah dari kemungkinan penyalahgunaan, (2) mendorong efisiensi dipenuhinya kebijakan manajemen pemerintah daerah, (3) memastikan bahwa informasi akuntansi telah disajikan secara akurat, serta (4) kepatuhan terhadap sistem dan prosedur atau regulasi yang berlaku. Selain itu, loyalitas bukanlah faktor utama yang menentukan perilaku individu untuk melakukan kecurangan akuntansi. Akan tetapi, kecurangan akuntansi disebabkan karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalitas.

Kontribusi terhadap metodologi penelitian adalah penggunaan skenario modul penelitian dalam menjelaskan variabel dan penggunaan alat analisis seperti SEM-PLS. Skenario modul penelitian dan penggunaan alat analisis menurut peneliti masih belum banyak digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi sektor publik, sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya akuntansi sektor publik.

Sedangkan kontribusi bagi kebijakan pemerintah daerah yaitu lebih efektif dalam menerapkan sistem pengendalian intern, sehingga berbagai skandal, kerugian, kegagalan

dapat dimitigasi. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi profil aktivitas operasional organisasi sebagai langkah mengantisipasi berbagai skandal yang terjadi. Selain itu, pengetahuan pemberlakuan *reward* dan *punishment* perlu diperhatikan sebagai sinyal positif bagi organisasi pemerintah daerah dalam memitigasi perilaku tidak etis.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah sampel untuk beberapa universitas secara simultan dengan meningkatkan kriteria pengambilan sampel seperti mahasiswa strata dua atau strata tiga, sehingga hasil penelitian semakin representatif dalam menjelaskan fenomena yang terjadi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor lain yang turut memengaruhi kecurangan akuntansi seperti moralitas individu dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abiola, J. (2013). *The Impact of information and communication technology on internal control's prevention and detection of fraud* (Doctoral Dissertation). Faculty of Business & Law, De Montfort University. Diakses dari <https://www.dora.dmu.ac.uk/handle/2086/9496>.
- ACFE. (2014). *Report to the Nations on occupational fraud and abuse*. Diakses dari <http://www.acfe.com/rtn2016.aspx>.
- Albrecht, S. W., & Albrecht, C. O. (2004). *Fraud examination and prevention*. Australia: Thomson, South-Western.
- Amrizal. (2004). *Pencegahan dan pendeteksian kecurangan oleh internal auditor*. BPKP. Diakses dari [http://bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/cegah\\_deteksi.pdf](http://bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/cegah_deteksi.pdf).

- Arifin, A. A. (2014). *Isomorphic pressures influencing the level of mandatory disclosure within financial statements of Indonesian local governments* (Doctoral Dissertation). School of Accounting, Curtin University. Diakses dari <https://espace.curtin.edu.au/handle/20.500.11937/2046>.
- BPK. (2012). *Buletin Teknis No. 01 tentang pelaporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah*. Jakarta.
- BPK. (2016). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2016*. Jakarta.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik: suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Campbell, S., & Hartcher, J. (2010). *Internal controls for small business*. National Office CPA Centre Level 28, 385 Bourke Street Melbourne. Diakses dari <https://mustberavi.com/Internal-controls-for-small-business-susan-campbell-cpa-and-judy-hartcher-free-related-pdf.html>.
- Corram, P., F., P., & Moroney, R. (2008). Internal audit, alternative internal audit structures and the level of misappropriation of assets fraud. *Accounting and Finance*. 48, 543–559. doi:10.1111/j.1467-629X.2007.00247.x.
- COSO. (2013). *Internal control – Integrated framework*. Durham, North Carolina. Diakses dari [https://na.theiia.org/standards-guidance/topics/Documents/Executive\\_Summary.pdf](https://na.theiia.org/standards-guidance/topics/Documents/Executive_Summary.pdf).
- Coughlan, R. (2005). Employee loyalty as adherence to shared moral values. *Journal of Managerial Issues*. 17(1) (Spring 2005), 43-57. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/40604474>.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. New Jersey: Montclair Patterson Smith.
- Gamage, C. T., Lock, K. L., & Fernando, A. A. J. (2014). A proposed research framework: Effectiveness of internal control system in state commercial banks in Sri Lanka. *International Journal of Scientific Research and Innovative Technology*. 1(5). Diakses dari [http://www.ijrsrit.com/uploaded\\_all\\_files/1633729483\\_02.pdf](http://www.ijrsrit.com/uploaded_all_files/1633729483_02.pdf).
- Hair, J. F., dkk. (2010). *Multivariate data analysis: A global perspective (7th ed.)*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Hartman, B. (2014). *Effects of internal control system on fraud in banks*. Diakses dari [http://www.ehow.com/info\\_8660735\\_effects-control-systems-fraud-banks.html](http://www.ehow.com/info_8660735_effects-control-systems-fraud-banks.html).
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). *Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi*. Jurnal ASPAK No. 17. Universitas Indonesia. SNA XV, Banjarmasin.
- Hogan, C. E., Rezaee, Z., Riley Jr, R. A., & Velury, U. K. (2008). Financial statement fraud: Insight from the academic literature. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*. 27(2), 231-252. <https://doi.org/10.2308/aud.2008.27.2.231>.
- International Federation of Accountants (IFAC). (2010a). *International Standard on Auditing (ISA) 700 forming an opinion and reporting on financial statements*. Diakses dari <http://www.ifac.org/system/files/downloads/a036-2010-iaasb-handbook-isa-700.pdf>.
- International Federation of Accountants (IFAC). (2010b). *International Standard*

- on Auditing (ISA) 705 modifications to the opinion in the independent auditor's report. Diakses dari <http://www.ifac.org/system/files/downloads/a037-2010-iaasb-handbook-isa-705.pdf>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2001). *Perimbangan atas pengendalian internal dalam audit laporan keuangan*. Standar Pemeriksaan Akuntan Publik SA Seksi 319. Jakarta.
- Indonesia Corruption Watch. (2017). *Tren penanganan kasus korupsi semester I 2017*. Jakarta.
- Khanna, A., & Arora, B. (2009). A study to investigate the reasons for bank frauds and the implementation of preventive security controls in Indian banking industry. *International Journal of Business Science and Applied Management*. 4(3).
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2).
- Lesmana, S. I. (2014). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia* (Tesis). Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Manas'seh, P. N. (1993). *Principles of auditing*. Nairobi: Focus Publications Ltd.
- Martani, D., & Liestani, A. (2012). Disclosure in local government financial statements: The case of Indonesia. *Global Review of Accounting and Finance*. 3(1). 67-84.
- Millichamp, W. C. (2002). Embracing risk-based auditing in internal corporate governance. *Finance Review*. June, 17-20.
- Ofori, W. (2011). *Effectiveness of internal control system: A perception or reality*. Thesis. Diakses dari <http://ir.knust.edu.gh/bitstream/123456789/4435/1/WILLIAM%20OFORI%20FINAL%20THESIS%202011.pdf>.
- Palfi, C. (2009). Control environment in banking system: An empirical study of Romanian framework vs. COSO and COCO models. *International Journal of Business Research*. 9(1).
- Puspasari, N. (2012). *Pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi: Studi eksperimen pada konteks pemerintah daerah*. (Tesis). Universitas Gadjah Mada.
- Rajikumar. (2009). Behavioral research in accounting. *Asian Journal of Management Research*.
- Ridwan, M. (2013). *Pengaruh loyalitas dan retaliasi terhadap kecenderungan akuntan untuk melakukan whistleblowing: Suatu eksperimen*. (Tesis). Universitas Gadjah Mada.
- Ruankaew, T. (2013). The fraud factors. *International Journal of Management and Administrative Sciences*. 2(2), 1-5.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 9(2), 154-170.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada kabupaten/kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. 8(1). DOI: <https://doi.org/10.14710/jaa.v8i1.4345>.

Tunji, S. T. (2013). Effective internal controls system as antidote for distress in the banking industry in Nigeria. *Journal of Economics and International Business Research*. 1(5), 106-121.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Wainaina, S. W. (2011). *An evaluation of the internal control function: The case of Kenya Polytechnic University College*. University of Nairobi. Diakses dari <http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/11009/An%20evaluation%20of%20the%20internal%20control%20function%3AThe%20case%20of%20Kenya%20Polytechnic%20University%20College.pdf?sequence=4>.

pdf?sequence=4.

Wanjohi, M. W. (2014). *Fraud in the banking industry in Kenya: A case of commercial Bank of Africa, Kenya*. United States International University Africa. Diakses dari <http://erepo.usiu.ac.ke/bitstream/handle/11732/44/Maryanne%20Wamuyu%20Wanjohi.pdf?sequence=1>.

## LAMPIRAN

### Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
LOYALITAS -> KECURANGAN AKUNTANSI	0,012	0,030	0,096	0,129	0,897
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL -> KECURANGAN AKUNTANSI	-0,892	-0,874	0,072	12,388	0,000
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL*LOYALITAS -> KECURANGAN AKUNTANSI	0,013	0,032	0,070	0,191	0,849

### R Square

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
KECURANGAN AKUNTANSI	0,811	0,828	0,047	17,235	0,000



**Average Variance Extracted (AVE)**

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics ( O/STDEV )</i>	<i>P Values</i>
KECURANGAN AKUNTANSI	1,000	1,000	0,000		
LOYALITAS	0,587	0,550	0,119	4,091	0,000
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	1,000	1,000	0,000		

**Composite Reliability**

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics ( O/STDEV )</i>	<i>P Values</i>
KECURANGAN AKUNTANSI	1,000	1,000	0,000		
LOYALITAS	0,847	0,758	0,199	4,254	0,000
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	1,000	1,000	0,000		

**Cronbach's Alpha**

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics ( O/STDEV )</i>	<i>P Values</i>
KECURANGAN AKUNTANSI	1,000	1,000	0,000		
LOYALITAS	0,804	0,789	0,072	11,219	0,000
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	1,000	1,000	0,000		

